

USAHA PEMERINTAH KOTA DUMAI DALAM MENURUNKAN KEMISKINAN

Dedy Rachmad

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah

(STIES) Imam Asy Syafii Pekanbaru

Jl. Marpoyan Damai, Pekanbaru

E-mail: dedyrachmad.dr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai faktor penyebab kemiskinan di Kota Dumai. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peranan Pemerintah Kota Dumai dalam usahanya mengurangi kemiskinan di tempat penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan tinjauan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kebijakan Pemerintah Kota Dumai sedikit banyak berhasil mengurangi kemiskinan meskipun belum sampai ke tahap yang maksimal. Analisis data menunjukkan bahwa faktor agama yang melibatkan unsur dosa dan pahala perlu diperhitungkan dalam mengelola program Pemerintah Kota Dumai untuk menampilkan karakteristik kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Dumai sedikit banyak juga telah berhasil meningkatkan sistem layanan kepada masyarakat dan meningkatkan standar hidup masyarakat setempat yang diukur oleh faktor dari dalam yang mencakup perbaikan mental masyarakat miskin, bidang pendidikan dan kesehatan, serta faktor dari luar yang meliputi bidang politik, sosial budaya dan bidang ekonomi.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Peranan Pemerintah Kota Dumai.*

Abstract

This study aims to describe various factors that cause poverty in Dumai City. This study also aims to analyze the role of the Dumai City Government in its efforts to reduce poverty at the research site. The research method used is a qualitative method. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and document review. The results of the study show that the implementation of the Dumai City Government's policy program has succeeded in reducing poverty even though it has not yet reached the maximum level. Data analysis shows that religious factors involving elements of sin and reward need to be taken into account in managing the Dumai City Government program to display the characteristics of the public interest rather than personal interests. The implementation of the Dumai City Government policy has more or less succeeded in improving the service system to the community and improving the living standards of local people as measured by internal factors which include mental improvement of the poor, education and health, as well as external factors that include politics, social culture and economics.

Keywords : *Poverty, Role of the Dumai City Government.*

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah yang telah ada sejak zaman dahulu. Sepanjang sejarah Indonesia, kemiskinan terus menjadi masalah yang serius, bahkan hampir seluruh tenaga telah dikerahkan untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Kemiskinan telah menyebabkan banyak masyarakat Indonesia tidak dapat menaikkan taraf hidupnya dan hidup dalam keterbelakangan seperti banyak anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara layak dan berkualitas, penduduk miskin tidak mampu berobat, kurangnya sarana dan prasarana umum, terbatasnya peluang pekerjaan dan kurangnya jaminan sosial bagi keluarga. Lebih parah lagi, kemiskinan telah menyebabkan rakyat Indonesia sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Keadaan kemiskinan di Indonesia tersebut telah menimbulkan banyak masalah baru yang akhirnya banyak orang berperilaku tidak baik seperti mencuri, membunuh dan merampas harta milik orang lain. Malahan, kemiskinan telah membuat masyarakat Indonesia terjebak dalam budaya meminta, mengemis, menggantungkan nasib (*dependency*) khususnya ketergantungan kepada budi baik pemerintah melalui pemberian bantuan.

Namun begitu, meskipun kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena yang universal, tetapi upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang membaik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12%), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64%). Jika dibandingkan dengan 10 tahun silam yaitu pada tahun 2007, angka di atas sangatlah membanggakan. Hal ini bisa dilihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia tahun 2007 mencapai 37,17 juta jiwa (16,58%). Kondisi 2007 tersebut juga sudah lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2003 yang mencapai 37,30 juta jiwa atau setara dengan 17,42% dari total penduduk Indonesia. (Data Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2017)

Kemiskinan di Indonesia dialami hampir di seluruh kawasan nusantara, termasuk Kota Dumai. Kemiskinan di Indonesia umumnya dan Kota Dumai khususnya bukan saja meluas pada satu golongan masyarakat tertentu, tetapi terjadi di seluruh tingkat lapisan masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di kota dan pedesaan.

Kemiskinan tersebut disebabkan oleh ketertinggalan mereka dari pengaruh pembangunan yang semestinya mereka dapatkan.

Kota Dumai merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang telah menjadi Kotamadya dan memisahkan diri dari Kabupaten Bengkalis sejak tahun 1999. Pada tahun 2013, angka kemiskinan di Kota Dumai sebesar 4,83%, lalu meningkat menjadi 5,26% pada tahun 2014 (Sensus Penduduk Kota Dumai tahun 2015). Hal ini sangat bertolak belakang jika dilihat dari letak Kota Dumai yang strategis dengan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Negara Malaysia, memiliki kekayaan sumber daya alam serta memiliki pelabuhan laut internasional hub (Pelindo I) serta memiliki kawasan industri.

Melihat fenomena di atas dengan dilatarbelakangi kekayaan sumber daya alam, potensi ekonomi daerah yang besar serta kedudukan kota yang strategis yang dimiliki oleh Kota Dumai menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih dalam tentang kemiskinan melalui penelitian tentang 'usaha Pemerintah Kota Dumai dalam menurunkan kemiskinan'.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) hal:

- Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Kota Dumai?
- Bagaimanakah peranan Pemerintah Kota Dumai dalam usahanya mengurangi kemiskinan di daerah penelitian?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- Mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kota Dumai.
- Menganalisis peranan Pemerintah Kota Dumai dalam usahanya mengurangi kemiskinan di daerah penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini secara umum adalah bahwa, kajian tentang program mengurangi kemiskinan di Indonesia perlu dilakukan, hal ini karena banyak penduduk Indonesia yang sejak dahulu kala berada di bawah garis kemiskinan. Keadaan tersebut menyebabkan banyak warga Indonesia yang melakukan tindakan yang tidak semestinya, seperti mencuri, mengemis dan lain sebagainya.

Kajian tentang peranan Pemerintah Kota dalam usahanya mengurangi kemiskinan di Kota Dumai

juga perlu dilakukan, disebabkan Kota Dumai menjadi salah satu kota di Propinsi Riau yang mengalami perkembangan sejak menjadi Kotamadya. Namun demikian, perkembangan dan potensi yang dimiliki oleh Kota Dumai tidak sejalan dengan keadaan masyarakatnya, dimana angka kemiskinan meningkat. Selain itu, upaya Pemerintah Kota Dumai dalam usahanya mengurangi angka kemiskinan di kawasan penelitian juga perlu dilakukan, mengingat kebijakan Pemerintah Kota telahpun dilaksanakan namun belum memberikan hasil yang maksimal dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin tempatan.

Kepentingan kajian ini diharapkan memberikan sumbangan yang positif terutama dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya terhadap masalah kemiskinan. Selain itu, kajian ini diharapkan menghasilkan analisa yang terbaik untuk melihat sejauhmana keberhasilan peranan Pemerintah Kota Dumai yang memberikan dampak positif dalam usahanya mengurangi kemiskinan di kawasan penelitian.

LANDASAN TEORI

Konsep Umum Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan menggambarkan berbagai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kemiskinan adalah sindrom situasi yang mencakup unsur kekurangan makanan dan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan, pengangguran, kondisi perumahan yang tidak aman, pekerjaan tanpa jaminan serta sikap dan pemikiran yang negatif. Oleh karena itu, konsep kemiskinan tidak terbatas hanya pada kegagalan material, tetapi juga kebutuhan spiritual (Osman Rani Hassan dan Abdul Majid Salleh, 1988: 31).

Definisi Kemiskinan

Para ahli telah menjelaskan arti kemiskinan menurut bidang pengetahuan masing-masing. Ahli ekonomi mendefinisikan kemiskinan dari perspektif total pendapatan, sosiolog mendefinisikannya dari perspektif budaya dan stratifikasi sosial masyarakat, sementara ahli kesehatan mendefinisikan kemiskinan dari sudut pandang zat makanan dan kalori. Namun berbagai definisi yang diberikan memiliki dasar kesetaraan yang dapat disorot dalam definisi konsep kemiskinan adalah dalam hal kekurangan. Tidak masalah apakah itu kekurangan pendapatan atau kekurangan gizi atau kekurangan lainnya. Semuanya menyoroti bahwa kemiskinan adalah sebuah kekurangan (Amartya Sen, 1981: 22).

Soerjono Soekanto (2011), menyatakan bahwa dari perspektif sosiologis, kemiskinan didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang tidak dapat mempertahankan dirinya sesuai dengan tingkat kehidupan kelompok dan tidak mampu menggunakan sumber mental atau fisiknya. Dalam artikel sebelumnya, Soerjono Soekanto (1995: 406) berpendapat bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang tidak dapat mempertahankan dirinya sesuai dengan taraf hidup kelompok tersebut dan juga tidak dapat memanfaatkan energi mental atau fisik dalam kelompok tersebut.

Amartya Sen (2011), pemenang hadiah Nobel mencatat bahwa dari perspektif ekonomi, kemiskinan adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan individu. Hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan. Dari perspektif politik, kemiskinan ditandai dengan terbatasnya ruang untuk berpartisipasi dalam program politik baik dalam menentukan kebijakan partai atau peserta. Kemiskinan menurut Amartya Sen juga didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.

Menurut al-Ghazali (1994), Islam reformis, bahwa kemiskinan adalah individu yang bekerja namun pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu kebutuhan hidup sendiri atau keluarga. Menurut al-Ghazali, dari perspektif Islam, kemiskinan terbagi menjadi dua: (i) kemiskinan spiritual, yang miskin secara spiritual karena kurangnya amal, seperti doa, pembacaan dan lain-lain, serta (ii) kemiskinan mental atau akhlak.

Di antara ahli lainnya yang mendefinisikan kemiskinan termasuk John Friedman (1979). Dia menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidaksetaraan kesempatan untuk mengumpulkan dasar kekuatan sosial seperti modal produksi, sumber daya keuangan, mobilitas sosial dan politik. Oleh karena itu disebutkan bahwa kemiskinan dikaitkan dengan aspek sosial dan aspek sumber daya alam. Menurut Jeremy (2006: 20), kemiskinan merupakan kekurangan mutlak atau kurangnya kebutuhan dasar bagi seseorang untuk bertahan hidup. Seorang penduduk dikatakan miskin bila diindikasikan oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi dan kesejahteraan hidupnya.

Sementara Nugroho, Iwan dan Dahuri (2004: 165-168) menyatakan bahwa kemiskinan adalah negara yang absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat di wilayah tertentu tidak memiliki properti yang cukup untuk kebutuhan dasar sesuai dengan nilai atau norma

tertentu di masyarakat karena alasan alam, budaya dan strukturalnya. Kemiskinan struktural disebabkan oleh terbatasnya kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh berbagai kebijakan dan keputusan dalam pembangunan. Kemiskinan ini umumnya dapat diidentifikasi melalui transformasi ekonomi yang tidak menguntungkan.

Definisi kemiskinan menurut institusi di Indonesia; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi di mana seseorang atau kelompok laki-laki dan perempuan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan air bersih, dan tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak untuk dipelihara dan mengembangkan kehidupan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai jumlah rupiah atau uang yang dihabiskan untuk keperluan konsumsi kurang dari 2.100 kalori per kapita. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menjelaskan bahwa keluarga dikatakan miskin jika mereka tidak dapat melakukan ibadah baik karena sakit, tidak mampu makan dua kali dalam sehari, tidak cukup pakaian, pendapatan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tidak memiliki rumah sendiri yang layak untuk dihuni.

Ciri-Ciri dan Dimensi Kemiskinan

Dari berbagai definisi di atas dapat diringkas tentang karakteristik kemiskinan sehingga bisa memudahkan pengukuran dan cara mengatasinya. Menurut Jeremy (2006), kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, adalah kemiskinan bagi individu yang tidak memiliki harta. Hal ini ditandai dengan orang-orang yang hidupnya selalu dalam masalah. Perumpamaan tentang orang miskin yang absolut adalah orang tua, kurus dan kusam, melarikan diri dari zona perang di Afrika Tengah atau badai di Asia Tenggara, dan orang-orang di daerah kering seperti Zimbabwe atau Ethiopia yang tampaknya kurus dan stagnan tanpa kekuatan.
- b. Kemiskinan relatif, adalah kemiskinan yang membandingkan seseorang dengan orang lain di lingkungannya, terutama mereka yang lebih beruntung.

Kemiskinan absolut ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan berdasarkan persyaratan utama. Sementara kemiskinan relatif adalah tingkat kemiskinan dalam kaitannya dengan rasio garis

kemiskinan absolut atau distribusi pendapatan (kesejahteraan) yang tidak merata atau tidak merata (ADB, 1999: 26).

Sementara itu, Kamal Salih (Kamal Salih, 1984: 28) menyatakan bahwa ada tiga karakteristik kemiskinan yang dapat membedakan antara miskin dan tidak miskin:

a. Keterancaman

Orang yang hidup miskin mudah terkena bencana alam yang tidak diinginkannya. Hal ini disebabkan oleh dampak inflasi yang sering terjadi, harga panen turun, banjir, penyakit dan limbah.

b. Pilihan terbatas

Orang miskin umumnya tidak memiliki pilihan hidup yang beragam dibandingkan dengan kelompok non-miskin seperti pilihan pekerjaan, pendidikan anak-anak, kesenangan hidup dan kebiasaan makan.

c. Akses terbatas

Orang miskin juga tertekan oleh posisi mereka yang tidak memiliki aset seperti tanah atau properti yang dapat digunakan untuk mengubah keadaan mereka yang miskin. Selain itu, rasa minder turut melemahkan mental ketika berbaur di tengah masyarakat dengan keadaan ekonomi yang serba terbatas.

Terdapat empat dimensi kemiskinan yang mencakup dimensi keuangan, dimensi kemampuan, dimensi eksklusi sosial dan dimensi partisipasi. Dari empat dimensi ini dapat dirangkum menjadi dimensi-dimensi pendapatan dan non-pendapatan (United Nation, 2004: 29).

Indikator Pengukur Kemiskinan

Secara umum, pendapatan individu atau rumah tangga digunakan sebagai pedoman dalam mengukur kemiskinan. Hal ini karena kekurangan pendapatan dihitung sebagai penyebab kemiskinan (Kamal Salih 1984: 29 & Belfield 2015). Selain itu, kekurangan non-pendapatan juga dapat digunakan sebagai langkah-langkah kemiskinan serta kurangnya fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas fisik lainnya (Abul Hasan M. Sadeq, 2002: 136).

Ada dua pendekatan untuk menggunakan pendapatan sebagai indikator pengukuran kemiskinan, yang merupakan cara absolut dan relatif (Townsend, 1979). Cara absolut didefinisikan sebagai standar minimum dalam standar hidup seseorang atau keluarga sesuai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan perumahan. Pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini dihitung dan disebut sebagai garis kemiskinan. Seseorang atau keluarga dengan penghasilan minimal di bawah pendapatan yang dibutuhkan disebut 'miskin'. Padahal, cara relatif

membandingkan kemiskinan dengan keseluruhan status masyarakat secara keseluruhan adalah dengan menghubungkan kemiskinan dengan distribusi pendapatan di masyarakat (Kamal Salih, 1984: 30).

Pendekatan yang biasa digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan non pangan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga komponen dasar: harapan hidup, indeks tingkat pendidikan dan juga indeks daya beli paritas. Indeks harapan hidup berhubungan dengan usia rata-rata populasi untuk bertahan hidup. Manakala indeks tingkat pendidikan terdiri dari indeks rata-rata sekolah dan indeks melek huruf. Rata-rata indeks sekolah dapat dihitung melalui komponen partisipasi sekolah, tingkat atau kelas menengah yang disahkan, dan tingkat pendidikan tersier dihentikan. Tingkat melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis untuk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan indikator ini, indeks pendidikan dapat diidentifikasi sebagai menentukan kemajuan pendidikan suatu bangsa (Dadang S. Ansori, 2002). Adapun indeks daya beli paritas terdiri dari pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*), parameter pendapatan dengan indikator daya beli masyarakat, serta mengukur manusia yang mandiri dan memiliki akses untuk layak.

Menurut Sayogyo dalam Syahrizal (2006: 8), klasifikasi kemiskinan berdasarkan pengeluaran per kapita per tahun diukur dengan beras lokal. Di daerah pedesaan, kriteria kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Paling miskin, yaitu saat pengeluaran per kapita tahunan 180 kg.
- b. Miskin, jika pengeluaran per kapita setiap tahunnya adalah 180 kg beras hingga 240 kg beras, atau pada saat produksi per kapita per tahun 240 kg beras menjadi 320 kg beras.
- c. Hampir miskin, yaitu jika pengeluaran tahunan per kapita adalah 320 kg sampai 480 kg beras.
- d. Tidak miskin, yaitu jika produksi lebih besar dari 480 kg per kapita per tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator garis kemiskinan berdasarkan kecukupan kalori standar per kapita dalam satu hari dengan 2.100 kalori. BPS menggunakan dua garis kemiskinan:

- a. Sangat miskin, yaitu jika seluruh pendapatan hanya bisa memenuhi kebutuhan 2.100 kalori.
- b. Miskin, yaitu pendapatan dapat memenuhi kebutuhan kalori atau memenuhi persyaratan minimum untuk kesehatan, pendidikan,

perumahan, pakaian dan persyaratan minimum lainnya untuk fasilitas memasak dan transportasi.

Sebab-Sebab Kemiskinan

Semua bentuk skema yang disiapkan untuk mengatasi kemiskinan seringkali melihat penyebab kemiskinan di suatu daerah. Hal ini karena mengidentifikasi penyebab kemiskinan adalah hal mendasar untuk mencapai keberhasilan skema tersebut. Dalam sistem ekonomi ada dua penyebab utama kemiskinan: yakni makro dan mikro.

Kemiskinan makro mencakup Produk Nasional Bruto (GNP) yang rendah dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Sebuah negara bisa dikatakan miskin karena pendapatan per kapita negara tersebut rendah, ini karena GNPnya rendah. Demikian pula, populasinya buruk karena distribusi pendapatan yang tidak merata, karena sumber pendapatan hanya terfokus pada beberapa orang dan menyebabkan kemiskinan bagi orang lain (Abul Hasan M. Sadeq, 2007: 115).

Adapun kemiskinan mikro menyebabkan banyak hal, seperti seseorang yang miskin karena pengangguran dan kecacatan atau karena terlahir dari keluarga miskin dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, akses ke pekerjaan berkualitas dan akses ke fasilitas dasar yang sesuai.

Adapun penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua bagian: (Sunyoto Usman, 1998, 3)

- a. Kemiskinan alami, yaitu kemiskinan alamiah yang terjadi karena kegagalan fisik individu dan lingkungan sebagai obyek, sehingga seseorang menjadi sulit dalam berbisnis atau bekerja. Dilihat dari individu, kemiskinan bisa terjadi karena kemalasan, kurang keterampilan, kurang kemampuan intelektual, lemah fisik dan tidak ada tekad untuk meraih kemenangan (*need for achievement*). Selain itu, kemiskinan juga bisa diakibatkan oleh orang miskin dengan tingkat kemiskinan yang rendah, karena mereka tidak dapat lolos dari kemiskinan.
- b. Kemiskinan struktural adalah bagian relatif, di mana ada sekelompok orang miskin, sementara kelompok lainnya tidak miskin. Sistem sosioekonomi yang berlaku memungkinkan fokus kekuasaan dan sumber daya pada pihak-pihak tertentu, yang menghalangi kesempatan bagi orang lain. Hal ini menyebabkan banyak orang miskin yang tidak dapat menggunakan akses ekonomi dan fasilitas lain yang benar-benar tersedia bagi mereka.

Teori Menangani Kemiskinan

Mengidentifikasi penyebab kemiskinan merupakan langkah awal setiap skema yang bertujuan mengurangi kemiskinan. Hal ini agar kebijakan yang ditetapkan untuk mengurangi angka kemiskinan sejalan dengan tujuan sebenarnya. Berikut adalah berbagai cara untuk mengatasi masalah kemiskinan serta bagaimana mengatasi kemiskinan menurut pandangan Islam dan pandangan konvensional.

a. Perspektif Islam

Sebagai sebuah agama yang menekankan kepada keseimbangan (*balance/tawazun*), Islam menekankan kedua aspek, yakni dunia dan akhirat. Dalam Islam, seseorang bisa memperbaiki hal-hal rohani dengan memperbaiki kehidupan duniawinya. Syariah (al-Quran dan Sunnah) telah memberikan panduan yang relatif komprehensif kepada umat Islam bagaimana menjalani hidup termasuk menangani masalah kemiskinan. Ayat Quran memberi bayangan bahwa Allah menyediakan rezeki yang cukup bagi hambaNya dalam QS. 7: 10 dan QS. 62: 10.

Beberapa ilmuwan Muslim berpendapat bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan berbagai cara sesuai dengan penyebabnya. Muhammad Ridwan (2014) berpendapat bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan membimbing ajaran Al-Quran. Di antara langkah-langkah yang harus ditempuh adalah bekerja dan bekerja, menyelamatkan nyawa dan tidak berlebihan, mewujudkan amal dan mengeluarkan zakat.

Yusuf al-Qardhawi (2009), menjelaskan bahwa dimensi Islam yang mampu melepaskan rakyatnya dari kemiskinan adalah zakat. Saat ini, zakat tidak hanya dikenal pada zaman klasik, namun telah berkembang seperti penanaman modal zakat atau investasi dan profesi zakat. Jika orang kaya Muslim kelas menengah mengetahui isu zakat dan zakat yang disebarkan dengan benar, sempurna dan profesional, maka tingkat kemiskinan di Indonesia akan berkurang. Potensi zakat sangatlah besar namun tidak diperhatikan.

Pada tingkat makro menurut perspektif Islam, kemiskinan dapat diatasi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Adapun tingkat ekonomi mikro bisa diatasi dengan memberikan kesempatan kerja. Sedangkan dalam hal iman dan takwa bisa diatasi dengan memperbaiki perkembangan sumber daya manusia. Kebijakan pengurangan kemiskinan harus dilihat dalam konteks hubungan dinamis antara proses pertumbuhan ekonomi dan nilai progresif.

b. Perspektif Konvensional

Terdapat teori sosiologis konvensional yang dapat dipahami oleh para ilmuwan dalam memahami kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan. Teori-teori ini terkadang tumpang tindih, sedikit kontradiktif dan tidak kontradiktif. Di antara teori-teori tersebut meliputi:

- 1) Teori neo liberal
- 2) Teori sosial demokratik
- 3) Teori marjinal/budaya kemiskinan
- 4) Teori perkembangan/bercorak pembangunan
- 5) Teori dependensi struktural
- 6) Teori ekonomi politik

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing teori;

1) Teori Neo Liberal

Paul Spicker (1995) berpendapat bahwa kemiskinan adalah masalah individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu. Kemiskinan akan menurun jika kekuatan pasar diperluas dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Menurut paham neo liberal, strategi membasmi kemiskinan harus bersifat residual (menghapus hingga ke akarnya) dan hanya melibatkan anggota keluarga, menjangkau kelompok atau lembaga keagamaan. Dalam kasus ini, negara tidak diizinkan untuk melakukan intervensi kecuali institusi tidak dapat menjalankan tugasnya.

2) Teori Sosial Demokratik

Cheyne, Cristine, Mike O'Brien dan Michael Belgrave (1998: 72) memandang bahwa kemiskinan bukanlah masalah individual, melainkan masalah struktural. Kemiskinan adalah hasil ketidakadilan dan ketidakseimbangan di masyarakat karena pembatasan akses terhadap sumber daya kelompok. Teori demokrasi sosial menekankan pentingnya peran negara dalam menyediakan pembiayaan dan layanan sosial fundamental bagi semua warga negara. Meski teori ini sama sekali tidak setuju pada pasar bebas, itu bukan sistem ekonomi anti kapitalis. Bahkan kapitalis masih dipandang sebagai bentuk paling efektif dari organisasi ekonomi. Pendukung teori ini berpendapat bahwa kesetaraan merupakan persyaratan penting untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Pencapaian kebebasan ini hanya bisa dilakukan jika setiap orang memiliki sumber kesejahteraan. Kebebasan memandang tidak hanya bebas dari pengaruh tapi juga bebas pilihan.

3) Teori Marjinal/Budaya Kemiskinan

Teori ini mengasumsikan bahwa kemiskinan perkotaan adalah hasil dari kemiskinan terpusat di antara masyarakat tertentu. Oscar Lewis (1966) adalah aliran teoritis marginal berteori konsep Budaya Kemiskinan. Menurut Lewis, masyarakat dunia miskin karena adanya budaya kemiskinan

yang memiliki karakter apatis, yang menyerah hanya pada takdir. Selain itu, kemiskinan dalam teori ini juga terjadi karena sistem keluarga yang tidak sehat, kurang pendidikan, kurang keinginan untuk membangun masa depan yang baik, seringnya kejahatan dan kekerasan.

Ada dua pendekatan yang berasal dari pandangan teori marginal:

- a) Inisiatif ini harus datang dari luar masyarakat.
- b) Perencanaan harus berfokus pada perubahan nilai karena penyebab masalah ada dalam nilai.

Di Indonesia, masalah kemiskinan secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kemiskinan struktural dan kemiskinan budaya. Masalahnya berdasarkan status Indonesia sebagai negara berkembang dan juga sejarah perlawanan Indonesia terhadap penjajahan Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Di antara proses penjajahan kolonial Belanda yang panjang di Indonesia adalah mengusahakan kegiatan komersial berupa pajak, pembukaan lahan baru dan jalan-jalan pembukaan yang berdampak pada menurunnya kesejahteraan petani, dan mereka yang memiliki modal besar semakin kaya.

4) Teori Perkembangan/Bercorak Pembangunan

Teori ini muncul dari teori perkembangan teori terutama neo-liberal. Teori ini mencari penyebab kemiskinan pada ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.

Adam Smith (1776) dalam bukunya *'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations'* menjelaskan bahwa kekuatan ada di tangan perusahaan dagang raksasa misalnya East India Company. Untuk menjaga kepentingan mereka, maka gerakan proteksionis ditegakkan sehingga praktek persaingan menjadi sangat terbatas. Proteksionisme ini merupakan penetapan tarif barang impor yang tinggi. Hal ini kemudian membuat harga produktivitas di dalam negeri lebih murah. Ada tiga asumsi mendasar dalam teori ini;

- a) Negara menjadi miskin karena kurangnya industrialisasi, permodalan, kemampuan manajemen dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian.
- b) Pertumbuhan ekonomi merupakan kriteria utama pembangunan yang dianggap sebagai masalah ketidakseimbangan.
- c) Kemiskinan akan hilang seiring pertumbuhan pasar dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Ketiga asumsi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah isu budaya, tapi masalah ekonomi dan pembangunan.

5) Teori Dependensi Struktural

Disebutkan bahwa "bangsa yang sumber dayanya mengalir dari 'pinggiran' negara-negara miskin dan terbelakang menjadi 'inti' negara-negara kaya, memperkaya yang terakhir dengan mengorbankan yang pertama". (Hans Singer 1998)

Meskipun arsitek teori struktural ini adalah ekonom Argentinian Raúl Prebisch, namun pemikiran yang berasal dari teori ketergantungan ini adalah Andre Gunder Frank (1967), penulis buku terkenal *Kapitalisme dan Keterbelakangan di Amerika Latin*. Teori ketergantungan struktural ini mengasumsikan bahwa kemiskinan bukan karena isu budaya dan pembangunan ekonomi saja, melainkan ekonomi politik dunia. Teorinya mengacu pada asumsi bahwa dunia didominasi oleh satu ekonomi sedemikian rupa sehingga semua bangsa di dunia akan diintegrasikan ke dalam lingkungan kapitalis yang menyebabkan kemunduran di negara-negara miskin. Akibatnya, negara-negara miskin menjadi semakin miskin.

6) Teori Ekonomi Politik

Teori ini berakar dari tulisan klasik Karl Marx dan Engels (1962) yang mendapatkan pendirian intelektualnya dari tokoh ekonomi terkenal seperti Smith (1937), Pye (1966) dan Mill (1970).

Teori ekonomi politik memiliki kekhawatiran tentang kekayaan sosial dan juga dampak pengembangan masyarakat dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Pendekatan ekonomi politik juga mencoba menjelaskan hubungan sosial yang ada di antara anggota masyarakat dalam semua proses produksi, pertukaran serta penggunaan barang dan jasa.

Pendekatan ekonomi politik memberikan nilai tinggi terhadap kondisi material terutama faktor ekonomi di semua kehidupan sosial. Tanpa ragu, kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan paling mendasar bagi manusia, karena mereka perlu makan sebelum bisa melakukan pekerjaan lain dalam kehidupan mereka.

Gambaran teori-teori kemiskinan di atas, memberikan informasi bahwa kemiskinan adalah suatu hal yang kompleks yang dapat didekati dari berbagai perspektif. Untuk tujuan penelitian ini, pendekatannya adalah untuk melihat semua motivasi, metode/cara, elemen/faktor penunjang, gagasan, pendekatan secara menyeluruh serta mengamati manfaat untuk bersikap positif dalam menjelaskan kemiskinan di Kota Dumai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Kemiskinan di Kota Dumai

Pembahasan tentang faktor penyebab kemiskinan di Kota Dumai tidak terlepas dari membicarakan tentang faktor penyebab kemiskinan di Indonesia.

1. Faktor Penyebab Kemiskinan di Indonesia

Banyak ahli mengemukakan beberapa faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Hartomo dan Aziz (Dadan Hudyana, 2009: 28-29) menyatakan bahwa faktor pendidikan yang rendah menjadi sebab seseorang kurang *skill*/keterampilan tertentu yang diperlukan dalam hidupnya. Pendidikan dan keterampilan yang kurang ini menyebabkan terbatasnya seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Begitu juga dengan sikap malas bekerja termasuk ke dalam sebab seseorang bersikap pasif atau bersandar pada nasib. Hal ini menjadikan seseorang tidak peka terhadap lingkungan yang akhirnya menghilangkan semangat untuk bekerja.

Faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan masyarakat di Indonesia adalah terbatasnya sumber daya alam. Sebuah masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Istilah yang sering digunakan dalam hal ini adalah ‘masyarakat menjadi miskin apabila sumber daya alamnya pun miskin/kurang’. Selain itu, terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikan banyak masyarakat Indonesia yang menganggur/tidak bekerja. Secara tidak langsung, ketiadaan pekerjaan menyebabkan orang menjadi tidak mempunyai pendapatan dan ketiadaan pendapatan membuat orang menjadi miskin.

Faktor berikutnya menurut Hartomo dan Aziz (Dadan Hudyana, 2009: 28-29) yang menyebabkan banyak penduduk di Indonesia menjadi miskin adalah terbatasnya modal untuk usaha. Selain itu, beban keluarga yang tidak diimbangi dengan meningkatnya pendapatan menjadi tolak ukur seseorang menjadi miskin karena pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Ahli lainnya, yaitu Suryadiningrat (Dadan Hudyana, 2009: 30), menguraikan bahwa kemiskinan di Indonesia hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen individu terhadap etika dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.

Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tidak lain adalah disebabkan tidak adanya keinginan dan usaha untuk bekerja, tidak mau untuk belajar, tidak memiliki rencana jangka panjang, budaya yang miskin dan pemahaman yang keliru terhadap kemiskinan.

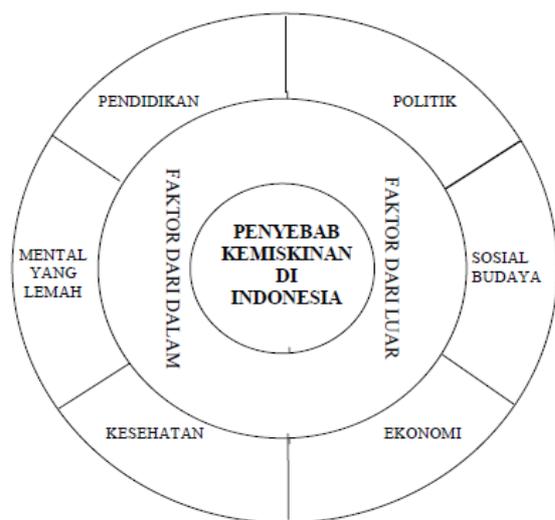
Adapun penganiayaan terhadap orang lain terlihat dari ketidakmampuan seseorang untuk bekerja dan berusaha. Hal ini disebabkan orang kaya tidak perhatian terhadap nasib orang miskin, ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada orang miskin.

Sementara itu, Kartasasmita (Rahmawati, 2006: 4) menjelaskan bahwa latar belakang penyebab kemiskinan di Indonesia ada 3 faktor; yaitu rendahnya taraf pendidikan, kesehatan dan kecilnya peluang pekerjaan. Rendahnya ketiga faktor ini menyebabkan terbatasnya kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang pekerjaan karena terbatasnya ilmu yang dimiliki, kurang gizi yang mengakibatkan lemah fisik dan daya pikir, serta hilangnya semangat dalam mencari peluang pekerjaan.

Nasikun (Suryawati, 2005: 5), mengemukakan penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia adalah pola produksi ala “kolonial Belanda” seperti keterbatasan kerja petani pada umumnya karena tanah yang paling subur dikuasai oleh petani berskala besar. Selain itu, manajemen sumber daya alam dan lingkungan yang rendah menyebabkan turunnya produktivitas. Kemiskinan yang terjadi juga disebabkan siklus alam sehingga kemiskinan di Indonesia semakin meluas. Petani yang bermukim di lahan kritis tidak mampu memproduksi secara maksimal dan berkelanjutan karena lahan yang mereka miliki akan banjir jika turun hujan, namun jika musim kemarau tiba lahan tersebut akan kekurangan air.

Nasikun juga mengemukakan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah faktor kaum wanita yang “dipandang sebelah mata”. Kaum wanita dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Selanjutnya, faktor budaya dan etnik juga menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia. Hal ini terjadi dengan pola hidup konsumtif di kalangan para petani dan nelayan saat menuai tiba, serta adat istiadat yang konsumtif ketika upacara adat dilangsungkan. Gambar 01 menjelaskan berbagai faktor penyebab kemiskinan di Indonesia menurut para ahli.

Gambar 01: Beberapa Faktor Penyebab Kemiskinan di Indonesia Menurut Para Ahli



Gambar 01 di atas menjelaskan bahwa faktor dari luar dan faktor dari dalam menjadi penyebab seseorang ataupun kelompok dikatakan miskin menurut para ahli. Faktor dari dalam dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, kesehatan dan lemahnya mental untuk keluar dari kemiskinan. Sedangkan faktor penyebab dari luar dipengaruhi oleh sosial budaya, ekonomi dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kemaslahatan orang miskin.

2. Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Dumai

Kota Dumai adalah daerah di provinsi Riau yang telah menjadi Kotamadya dan memisahkan diri dari Kabupaten Bengkalis sejak tahun 1999. Pada tahun 2013, angka kemiskinan di Kota Dumai sebesar 4,83%, lalu meningkat menjadi 5,26 % pada tahun 2014 (Sensus Penduduk Tahun 2014).

Kenaikan angka kemiskinan yang terjadi di Kota Dumai antara tahun 2014-2015 tersebut adalah disebabkan oleh perencanaan pembangunan yang “berjalan sepihak”, yaitu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Dumai tidak sepenuhnya melihat kondisi riil dan kepentingan sesungguhnya yang berpihak untuk masyarakat miskin di Kota Dumai, atau beberapa program yang telah dirancang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.

Tahun 1998, pernah dibuat satu kajian kemiskinan di Kota Dumai tepatnya di Desa Basilam Baru (Desmaniar, 2002). Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran keadaan kemiskinan dari 80 kepala rumah tangga orang miskin. Penelitian juga dilakukan untuk

mengetahui faktor penyebab kemiskinan di Kota Dumai. Indikator menilai kemiskinan di tempat kajian menggunakan pemikiran kemiskinan struktural seperti sarana dan prasarana pendidikan, air bersih, kesehatan dan sarana transportasi.

Adapun aspek budaya dilihat dari hakekat hidup seperti karya manusia dan kedudukannya dalam ruang dan waktu, serta hakekat hubungan antara manusia dengan lingkungan dan hubungannya dengan sesama manusia. Hasil kajian menjelaskan bahwa faktor budaya tidak signifikan pengaruhnya terhadap penyebab kemiskinan di Kota Dumai, sedangkan aspek struktural menunjukkan bahwa faktor penyebab kemiskinan adalah berasal dari pengaruh luar seperti tidak adanya kebijakan pemerintah yang berasal dari keinginan kalangan bawah atau masyarakat miskin.

Tahun 1999, dilakukan pula kajian kemiskinan di Kota Dumai oleh Sujianto (2009) yang berjudul ‘Kebijakan Pembebasan Kemiskinan, Tinjauan Budaya Lokal’. Hasil kajian menerangkan bahwa kemiskinan di Kota Dumai bukan hanya bersifat perorangan, namun juga bersifat primordial kesukuan, tidak ada jaminan sosial, hidup di daerah terasing dan yang lainnya. Potret kemiskinan masyarakat Kota Dumai dalam kajian ini boleh dilihat dari beberapa faktor:

- Faktor dari dalam (internal) seperti perilaku, pilihan atau kemampuan individu dalam menjalankan hidup.
- Faktor dari luar (eksternal) seperti lingkungan sosial, lingkungan budaya, deportasi pekerja ilegal dari negara tetangga dan faktor struktural. Bagan 01 menjelaskan faktor penyebab kemiskinan di Kota Dumai menurut Sujianto.

Bagan 01: Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Dumai Menurut Sujianto

No.	Faktor	Item	Permasalahan
1.	Dalaman	Faktor Mental	- Perilaku individu masyarakat - Pilihan dalam melihat peluang - Kemampuan dalam menjalani hidup
		Faktor Penunjang	- Taraf ekonomi yang kurang - Pendidikan yang rendah - Sakit yang berkepanjangan
2.	Luaran	Lingkungan Sosial dan Budaya	- Kebiasaan hidup yang menyimpang seperti memakai obat-obatan dan narkoba - Ketidakmampuan orang tua dan anak untuk keluar dari lingkaran kemiskinan
		Struktural	- Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin - Kurangnya perhatian Pemerintah Kota Dumai bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di kota tersebut

Sumber: Sujianto (2009), ‘Kebijakan Pembebasan Kemiskinan, Tinjauan Budaya Lokal’.

Kedua kajian di atas (Desmaniar dan Sujianto) memiliki perbedaan. Kajian pertama dilakukan hanya pada satu desa saja dengan sistem manajemen yang berbeda antara pemerintahan desa dengan pemerintahan kelurahan. Sedangkan kajian kedua dilakukan dengan sistem manajemen pemerintahan Kelurahan di Kota Dumai.

Selain itu, kajian pertama dilakukan di Desa Basilam Baru, yaitu satu kawasan di Kota Dumai yang terisolasi dan sulit untuk dijangkau dari pusat Kota Dumai yang pada saat itu berstatus sebagai kota administratif, dimana kewenangan pemerintahan dan juga kontrol keuangan berada di pusat yaitu Kabupaten Bengkalis. Sedangkan kajian kedua lebih terfokus pada tinjauan budaya lokal.

Peranan Kebijakan dan Program Pemerintah Kota Dumai Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kawasan Penelitian

Karakteristik penelitian ini sangat berkaitan erat dengan peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara. Berikut adalah pembahasan dalam bagian ini yang akan menguraikan tentang dua hal, yaitu kemiskinan dan program daerah mandiri di Kota Dumai, serta kebijakan Pemerintah Kota melalui program-program mengurangi kemiskinan di Kota Dumai.

1. Kemiskinan dan Program Daerah Mandiri di Kota Dumai

Kemiskinan umumnya terdapat pada sekumpulan komunitas masyarakat. Kumpulan tersebut dikatakan miskin karena ketertinggalan mereka dari pembangunan yang semestinya. Mereka seolah-olah tidak menikmati bentuk kemajuan, termasuk upaya untuk merubah hidup mereka ke arah yang lebih baik.

Perubahan sikap dan kebiasaan tersebut sangat sulit bagi sekelompok masyarakat yang terbiasa dengan pola hidup mereka. Kalaupun ada perubahan, pasti akan berjalan sangat lambat. Hal inilah yang terjadi di Kota Dumai. Berbagai teori dan analisis menyebutkan bahwa tradisi masyarakat Kota Dumai sering dikaitkan dengan ketidakberdayaan mereka untuk berubah dan keluar dari garis kemiskinan. Hal ini dikatakan sejalan dengan teori 'Perilaku Individu' yang menyebutkan bahwa sikap seseorang yang tidak produktif telah menyebabkan keadaan mereka menjadi miskin (Michael Sherraden 2006: 48).

Sedangkan teori 'sosial' menyebutkan bahwa keadaan miskin telah mempengaruhi perilaku setiap orang seperti munculnya sikap tidak produktif yang merupakan akibat dari adaptasi dengan keadaan miskin. Hal ini berdampak kepada perasaan "terisolasi" dan malu untuk berbaur dengan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Walau bagaimanapun juga, ketidakberdayaan tersebut menjadi lebih buruk dengan sikap dan perilaku mereka sendiri. Oleh karena itu, secara bertahap diperlukan pemutusan 'mata rantai' oleh berbagai pihak yang cenderung memiliki pengaruh yang kuat untuk mengubah sikap masyarakat yang seperti ini. Ketidakberdayaan mereka itu bukan hanya miskin dari segi materi, tetapi '*powerlessness*' dari segi sosial, psikologi dan praktek kehidupan sehari-hari. Penanganan masalah kemiskinan tersebut selain diharapkan datang dari orang miskin bersangkutan, tentu diharapkan juga datang dari Pemerintah Kota Dumai serta lembaga-lembaga lainnya yang perhatian terhadap nasib masyarakat miskin melalui program pembangunan.

2. Kebijakan Pemerintah Kota Melalui Program-Program Mengurangi Kemiskinan di Kota Dumai

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemerintah Kota Dumai telah memberlakukan program-program untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai sejak tahun 1999.

Deskripsi program Pemerintah Kota Dumai dalam mengurangi angka kemiskinan terdiri dari tiga hal, yaitu objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Diantara program kebijakan Pemerintah Kota Dumai yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dilakukan melalui perbaikan mental dan budaya masyarakat miskin yang lemah. Hal ini dilakukan dengan cara membangun karakter yang kuat untuk mau bekerja dan senantiasa berusaha ke arah memperbaiki taraf hidup serta menanamkan minat dan potensi diri sejak kecil agar pekerjaan yang ditekuni oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan kemahiran yang tumbuh secara alami. Disamping itu, Pemerintah Kota Dumai juga menyediakan segala bentuk sarana dan prasarana untuk pengembangan keterampilan masyarakat setempat.

Selain itu dalam bidang sosial kemasyarakatan, Pemerintah Kota Dumai menanamkan kesadaran kepada golongan yang mampu untuk mau berbagi kepada saudaranya yang tidak mampu dengan cara mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan wakaf serta turut memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk berkreatif

mengembangkan potensi diri. Peranan masyarakat sipil pun turut didorong.

Sejauh ini, program Pemerintah Kota Dumai dalam usahanya mengurangi kemiskinan dinilai telah memberikan tren yang positif walaupun belum sepenuhnya efektif. Bukti ini dapat dilihat dalam Bagan 02 tentang data kemiskinan yang ada di Kota Dumai sejak tahun 2011 hingga tahun 2016.

Bagan 02: Jumlah Penduduk Miskin di Kota Dumai Antara Tahun 2011-2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Persentase)
1	2011	13.97	5.27
2	2012	14.30	5.23
3	2013	13.70	4.98
4	2014	13.62	4.83
5	2015	14.97	5.26
6	2016	13.76	4.74

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, belum efektifnya kebijakan dan program Pemerintah Kota Dumai tersebut lebih disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Bukti ini didapat dari hasil wawancara dan juga observasi. Hasil wawancara peneliti dapatkan melalui tanya jawab secara langsung kepada responden yang dibagi kepada 3 (tiga) kategori, yaitu penentu kebijakan Pemerintah Kota Dumai, pelaksana kebijakan dan penilai kebijakan. Bagan 03 mendeskripsikan kaedah pemilihan sampel responden wawancara dalam proses penyelidikan.

Bagan 03: Kaedah Pemilihan Sampel Responden Wawancara Dalam Proses Penyelidikan

Kategori Responden	Responden Wawancara Yang Dipilih	Proses Penyelidikan
Penentu Kebijakan	- Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kota Dumai - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai - Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai	1. Faktor Internal: - Dimensi Pendidikan - Dimensi Kesehatan - Dimensi Memperbaiki Mental yang Lemah 2. Faktor Eksternal: - Dimensi Politik - Dimensi Sosial dan Budaya - Dimensi Ekonomi
Pelaksana Kebijakan	- Lurah - Guru - Dokter	
Penilai Kebijakan	- Ahli Sosiologi - Ahli Bidang Pendidikan - Ahli Bidang Ekonomi	

Hasil wawancara peneliti kepada seluruh responden adalah sebagai berikut:

Formulasi Umpan Balik dari Responden Wawancara Tentang Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Terhadap Faktor Dari Dalam (Faktor Internal)

a. Dimensi Pendidikan

Dimensi	Unsur Sebelum	Unsur Sesudah
Pendidikan	- Menanamkan pemahaman pentingnya belajar untuk bekal masa depan - Memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang pentingnya pengembangan diri melalui pendidikan & keterampilan - Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak hingga jenjang yang lebih tinggi	- Menanamkan pemahaman pentingnya belajar untuk bekal masa depan - Memberikan keyakinan kepada masyarakat akan pentingnya pengembangan diri melalui pendidikan & keterampilan - Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak hingga jenjang yang lebih tinggi - Menambah sarana dan prasarana belajar untuk masyarakat seperti sekolah kejuruan atau sekolah keahlian - Memberikan kemudahan iuran sekolah kepada siswa yang tergolong tidak mampu. Pemerintah Kota Dumai juga sebaiknya memberikan beasiswa hingga ke luar negeri bagi masyarakat miskin yang ingin melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi

b. Dimensi Kesehatan

Dimensi	Unsur Sebelum	Unsur Sesudah
Kesehatan	- Membangun pola hidup sehat di lingkungan masyarakat umum - Memperbaiki & menambah sarana prasarana berobat - Memberikan motivasi perlunya menjaga pola makan yang sehat untuk pengembangan gizi ibu dan anak	- Membangun pola hidup sehat di lingkungan masyarakat umum - Memperbaiki & menambah sarana prasarana berobat - Memberikan motivasi perlunya menjaga pola makan yang sehat untuk pengembangan gizi ibu dan anak - Mengaitkan kesehatan dengan unsur agama agar para hamba senantiasa menjaga hidup bersih dan sehat baik fisik, fikiran dan hati

c. Dimensi Memperbaiki Mental yang Lemah

Dimensi	Unsur Sebelum	Unsur Sesudah
Memperbaiki Mental Yang	- Membentuk masyarakat sipil	- Membentuk masyarakat sipil yang

Lemah	<p>yang dinamis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki mental masyarakat untuk giat bekerja bagi meningkatkan penghasilan - Membangun karakter yang kuat untuk senantiasa berusaha ke arah memperbaiki taraf hidup 	<p>dinamis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki mental masyarakat untuk giat bekerja bagi meningkatkan penghasilan - Membangun karakter yang kuat untuk senantiasa berusaha ke arah memperbaiki taraf hidup - Menyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat - Menanamkan minat dan potensi diri sejak kecil agar pekerjaan yang ditekuni oleh setiap individu berdasarkan keterampilan yg tumbuh semula jadi
-------	--	---

c. Dimensi Ekonomi

Dimensi	Unsur Sebelum	Unsur Sesudah
Pertimbangan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus korupsi dalam proyek program pembasmian kemiskinan yang dibuat oleh Pemerintah Kota - Menghapus unsur <i>gharar</i> (ketidakjelasan) dalam pelayanan publik - Membuat kebijakan yang tepat dalam pemerataan distribusi sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Unsur dosa dan pahala - Unsur keberkatan dalam hidup - Menghapus korupsi dalam proyek program pembasmian kemiskinan yang dibuat oleh Pemerintah Kota - Menghapus unsur <i>gharar</i> (ketidakjelasan) dalam pelayanan publik - Membuat kebijakan yang tepat dalam pemerataan distribusi sumber daya alam

Formulasi Umpan Balik dari Responden Wawancara Tentang Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Terhadap Faktor Dari Luar (Faktor Eksternal)

a. Dimensi Politik

Dimensi	Unsur Sebelum	Unsur Sesudah
Pertimbangan Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah dalam usaha mengatasi kemiskinan di Kota Dumai - Memperbaiki mental staf Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan program-program pembasmian kemiskinan di Kota Dumai - Meniadakan kebijakan Pemerintah Kota yang tidak pro pada kemaslahatan orang miskin 	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah dalam usaha mengatasi kemiskinan di Kota Dumai - Memperbaiki mental staf Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan program-program pembasmian kemiskinan di Kota Dumai

b. Dimensi Sosial dan Budaya

Dimensi	Unsur Sebelum	Unsur Sesudah
Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kesadaran kepada golongan yang mampu untuk mau berbagi dengan saudaranya yang tidak mampu - Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk berkreasi mengembangkan potensi diri - Mengontrol budaya adat di Kota Dumai untuk tetap menjaga pola saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Memasukkan unsur agama dalam memberikan kesadaran kepada golongan yang mampu untuk mau berbagi dengan saudaranya yang tidak mampu - Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk berkreasi mengembangkan potensi diri - Mengontrol budaya adat di Kota Dumai untuk tetap menjaga pola saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya

PENUTUP

Kesimpulan

Kemiskinan di Indonesia umumnya dan Kota Dumai khususnya adalah fenomena yang ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Namun begitu, kenyataan tersebut tidak lantas membuat Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kota Dumai berdiam diri dengan keadaan yang ada. Pemerintah terus membuat langkah perbaikan dengan membuat kebijakan-kebijakan dan program-program yang bersifat pro rakyat. Diantara kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masing-masing daerah melakukan penataan dan pengelolaan keuangan secara mandiri, tidak terkecuali di Kota Dumai.

Kota Dumai sebagai salah satu daerah yang kaya di Provinsi Riau menjadi perhatian dalam hal ketidakseimbangan antara potensi daerah dengan faktor kemiskinan. Angka kemiskinan di Kota Dumai sebesar 4,83% tahun 2013 meningkat menjadi 5,26% pada tahun 2014. Hal ini sangat bertolak belakang jika dilihat dari letak Kota Dumai yang strategis dengan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Negara Malaysia, memiliki kekayaan sumber daya alam serta memiliki pelabuhan laut international hub (Pelindo I) serta memiliki lima kawasan industri.

Salah seorang peneliti yang membuat penelitian berkaitan dengan faktor penyebab kemiskinan di Kota Dumai adalah Sujianto tahun 2009 dengan judul 'Kebijakan Pembebasan Kemiskinan, Tinjauan Budaya Lokal'. Hasil kajian menerangkan bahwa kemiskinan di Kota Dumai bukan saja bersifat perorangan, tetapi juga bersifat primordial kesukuan, tidak ada jaminan sosial, hidup di daerah terisolasi dan sebagainya. Potret

kemiskinan masyarakat Kota Dumai dalam penelitian ini dapat dilihat dari beberapa faktor:

- a. Faktor dalaman (internal) seperti perilaku, pilihan atau kemampuan individu dalam menjalankan hidup.
- b. Faktor luaran (eksternal) seperti lingkungan sosial, lingkungan budaya, deportasi pekerja ilegal dari negara tetangga dan faktor struktural.

Di Kota Dumai, program kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dilakukan melalui perbaikan mental dan budaya masyarakat miskin yang lemah. Hal ini dilakukan dengan cara membangun karakter yang kuat untuk mau bekerja dan senantiasa berusaha ke arah memperbaiki taraf hidup serta menanamkan minat dan potensi diri sejak kecil agar pekerjaan yang ditekuni oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keahlian yang tumbuh secara alami. Disamping itu, Pemerintah Kota Dumai juga menyediakan segala bentuk sarana dan prasarana untuk pengembangan keahlian masyarakat setempat.

Selain itu dalam bidang sosial kemasyarakatan, Pemerintah Kota Dumai menanamkan kesadaran kepada golongan yang mampu untuk mau berbagi kepada saudaranya yang tidak mampu dengan cara mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan wakaf serta turut memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk berkreasi mengembangkan potensi diri. Peranan masyarakat sipil pun turut didorong.

Sejauh ini, program Pemerintah Kota Dumai dalam usahanya mengurangi kemiskinan dinilai telah memberikan tren yang positif walaupun belum sepenuhnya efektif. Belum efektifnya kebijakan dan program Pemerintah Kota Dumai tersebut lebih disebabkan oleh 2 (dua) faktor; yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal).

Saran

Keadaan Pemerintah Kota Dumai sekarang ini sangat berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada otoritas manajemen pemerintahan dan keuangan, dimana kedua manajemen berada dalam daerah mandiri Pemerintah Kota Dumai. Objektif penelitian lebih luas dan angka kemiskinan di Kota Dumai hingga sekarang masih belum setara dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang dimiliki serta letak kota yang strategis. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian baru untuk mengetahui kondisi terkini masyarakat miskin di tempat penelitian, sekaligus mengetahui

apakah kebijakan Pemerintah Kota dinilai efektif dalam mengelola daerahnya untuk tujuan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas yang diiringi dengan tinjauan terkini, ada 4 (empat) hal penting yang disarankan dan perlu dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Dumai dalam usahanya mengatasi masalah kemiskinan:

- a. Pemetaan faktor utama penyebab kemiskinan.
- b. Upaya-upaya fokus yang perlu dilakukan untuk mengurangi kemiskinan.
- c. Menentukan kebijakan yang tepat untuk dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat miskin terkini.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap seluruh program agar segala bentuk usaha yang dilaksanakan untuk tujuan membasmi kemiskinan tepat sasaran.

Keempat hal tersebut perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak Pemerintah Kota Dumai, mengingat hal-hal yang dinyatakan tersebut dinilai memberikan jawaban yang nyata bagi mengurangi jumlah penduduk miskin dan memperbaiki kualitas hidup kelompok masyarakat yang tergolong miskin di Kota Dumai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Hasan M. Sadeq (2002), "Proverty Alleviation an Islamic Perspective". *Humanomics*, vol. 14, no. 3/4, 1997.
- ADB (1999), *Fighting Poverty in Asia and The Pacific; The Poverty Reduction Strategy of The Asian Development Bank*. Mimeo.
- Amartya Sen (1981), *Poverty and Famines An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Clarendon Press.
- _____ (2011), *Peace and Democratic Society*. Cambridge, UK: Open Book Publishers.
- Belfield, Chris et. al (2015), *Living Standards, Poverty and Inequality in the UK*. London: The Institute for Fiscal Studies.
- Cheyne, Cristine, Mike O'Brien and Michael Belgrave (1998), *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction*. Auckland: Oxford University Press.
- Dadan Hudyana (2009), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Bogor: IPB.
- Dadang S. Ansori (2002), "Reaksi Desa, Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)". *Pikiran*

- Rakyat, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0703/110802.htm>, diakses 2 Ogos 2011.
- Desmaniar (2002), *Faktor-Faktor Penyebab Miskinnya Desa Basilam Baru, Riau*, Dokumen Tesis Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, [http://www.google.co.id/search?hl=id&source=hp&ie=ISO-8859-1&q=kemiskinan+di+Amerika+Latin&meta=1&q=kemiskinan+di+Amerika+Latin&meta=1](http://www.google.co.id/search?hl=id&source=hp&ie=ISO-8859-1&q=kemiskinan+di+Amerika+Latin&meta=1&q=kemiskinan+di+Amerika+Latin&meta=1&q=kemiskinan+di+Amerika+Latin&meta=1) diakses pada 12 Maret 2010.
- Friedman, John (1979), *The Good Society*. Cambridge: MIT Press.
- Ghazali, al- (1994), *Man is the Basis of the Islamic Strategy for Economic Development*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Jeremy, Seabrook (2006), *Kemiskinan Global; Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme*. Yogyakarta: Resiste Book.
- Kamal Salih (1984), "Konsep, Definisi dan Pengukuran Kemiskinan", dalam Alladin Hashim et al. (ed.), *Kemiskinan Luar Bandar*. KL: AIM.
- Lewis, Oscar (1966), "The Culture of Poverty", Volume 215 Number 4, *Establish American*.
- Marx, Karl and Engels, Friedrich (1962), *Collected Works*. Moscow: Foreign Languages Publishing House.
- Muhammad Ridwan (2014), "Penanggulangan Kemiskinan: Miskin Kinerja?", <http://p2kp.org/wartadetil.asp?mid=6432&catid=2&>, diakses 12 April 2014.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri (2004). *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Osman Rani Hassan dan Abdul Majid Salleh (1988), "Konsep-Konsep Kemiskinan dan Ketaksamaan: Satu Tinjauan", dalam Chamhuri Siwar dan Mohd Hafilah, Isu, Konsep dan Dimensi Kemiskinan (Kumpulan Rencana Tentang Kemiskinan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Sendiran Berhad.
- Qardhawi, Yusuf, al- (2009), *Halal dan Haram Perspektif Islam*, Terj. Abu Jabir Muhammad, Edisi 2. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.
- Rahmawati (2006), "Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta", Simposium Nasional Akuntansi IX., Padang.
- Sherraden, Michael (2006 a), *Aset Untuk Orang Miskin; Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Singer, Hans (1998), *The South Letter* (30) "The Terms of Trade Fifty Years Later - Convergence and Divergence.
- Smith, Adam (1776), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Edisi Pertama. London: W. Strahan. Retrieved.
- Soerjono Soekanto (1995), *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ (2011), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Ke-10. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Spicker, Paul (1995), *Social Policy; Themes and Approaches*. London: Prentice- Hall.
- Sujianto (2009), *Kebijakan Pembebasan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan: Tinjauan Budaya Lokal*. Pekanbaru: AlafRiau.
- Sunyoto Usman (1998), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryawati, C (2005), *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Tesis Universitas Diponegoro, Jawa Tengah.
- Syahrizal (2006), *Strategi Buruh Perkebunan Mengatasi Kemiskinan: Studi di Perkebunan Teh PT. Mitra Kerinci Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press.
- Townsend, Peter (1979), *Poverty in the United Kingdom*. London: Penguin Books Ltd..

Undang-Undang dan Dokumen Resmi Pemerintah:

- Badan Pusat Statistik Pusat Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
- Badan Pusat Statistik Kotamadya Dumai.
- Sensus Penduduk Kota Dumai Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.